

Tanam Pohon, Babinsa Koramil 1431-03/Poleang Bersinergi dengan Aparat Desa dan Masyarakat

Bombana, SultraNET. | - Sebagai upaya mencegah banjir dan polusi udara, anggota Koramil 1431-03/Poleang melaksanakan penanaman pohon di Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, Selasa (28/1). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Babinsa Sertu Mirdawan dengan melibatkan aparat desa dan warga masyarakat.

Sebanyak 50 pohon berhasil ditanam di sekitar desa tersebut. Kegiatan ini turut dihadiri oleh aparat desa, di antaranya Jusman, Jamaluddin, dan Herman selaku Kepala Dusun, serta anggota Koramil seperti Serda Paulus, Serda Susanto, dan Kopda Muh. Faisal. Selain itu, puluhan warga masyarakat juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.



Babinsa Sertu Mirdawan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Babinsa Koramil 03/Poleang terhadap lingkungan Desa Binaan.

“Penanaman pohon ini adalah langkah kecil dengan dampak besar untuk masa depan. Kami berharap pohon-pohon ini mampu menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi risiko banjir di desa,” ungkapnya.

Salah Seorang Kepala Dusun, Jusman, mengapresiasi inisiatif tersebut. “Kolaborasi antara TNI, aparat desa, dan masyarakat seperti ini sangat bermanfaat. Tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga mempererat tali silaturahmi di antara kita,” ujar Jusman.

Danramil 1431-03/Poleang, Lettu Inf Dahlan, menambahkan bahwa kegiatan seperti ini akan terus didorong di wilayah lain.

“Sinergi antara TNI dan masyarakat adalah kunci keberhasilan setiap program. Kami berharap kegiatan ini menjadi contoh baik bagi desa lain,” pungkasnya.

Gerak Cepat Babinsa Koramil 1431-03/Poleang Kunjungi dan Data Warganya yang Terdampak Banjir Akibat Hujan Deras

Bombana, SutraNET. | - Babinsa Koramil 1431-03/Poleang bergerak cepat mengunjungi dan mendata warga Desa Poleonro, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana, yang terdampak banjir akibat luapan Sungai Akacipong dan Sungai Poleonro. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut menyebabkan air sungai meluap dan menggenangi pemukiman warga. Senin, (27/01)

Babinsa Desa Poleonro, Serda Justang, menyampaikan bahwa sebanyak 14 rumah penduduk terdampak banjir.

“Sampai saat ini tidak ada korban jiwa. Kerugian materiil sementara diperkirakan Puluhan juta, namun kami tetap akan memantau bersama warga untuk memastikan kondisi terkini,” ujarnya.

Meski banjir mulai surut, warga Desa Poleonro masih menunggu air benar-benar surut karena genangan masih tinggi di dalam rumah-rumah mereka. Selain itu, arus air dari Kecamatan Tontonunu juga turut memperlambat proses surutnya banjir di wilayah tersebut. Aktivitas masyarakat saat ini masih terganggu dan mereka tetap waspada terhadap potensi banjir lanjutan.



Di Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu, juga terjadi banjir akibat luapan Sungai Tontonunu. Hujan deras yang turun di wilayah tersebut menyebabkan 8 kepala keluarga (KK) rumahnya terdampak banjir.

Babinsa Desa Tontonunu, Serda Haruna, menyampaikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

“Kerugian materiil sementara tidak ada, namun kami terus melakukan pemantauan terhadap laporan warga dan perkembangan ketinggian air guna mengantisipasi kemungkinan banjir susulan” kata Serda Haruna.



Danramil 1431-03/Poleang, Lettu Inf Dahlan saat dikonfirmasi menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat desa dan warga setempat.

“Sudah menjadi tugas Babinsa untuk selalu mendata dan mengetahui perkembangan yang terjadi di wilayah binaan masing-masing. Kami akan terus hadir di tengah masyarakat dan berupaya menjadi solusi atas permasalahan yang mereka hadapi,” ujarnya.

Danramil Poleang juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap kondisi cuaca ekstrem dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Upaya penanganan seperti pendataan kerugian, pembersihan rumah warga, dan pemantauan debit air sungai terus dilakukan oleh Babinsa bersama masyarakat guna meminimalkan dampak lebih lanjut.

Dengan adanya kehadiran Babinsa di lokasi terdampak, diharapkan warga dapat merasa lebih aman dan terbantu dalam menghadapi bencana banjir ini. TNI bersama warga setempat terus berupaya memulihkan kondisi lingkungan dan membantu masyarakat untuk kembali beraktivitas seperti biasa. (PEN)

Tugas Personil Sekretariat PPK dan PPS Pilkada 2024 Berakhir, KPU Bombana Sampaikan Ucapan Terima Kasih

Bombana, sultranet.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bombana tahun 2024 telah selesai dengan sukses, dan kini menandai berakhirnya tugas personil sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah bekerja keras mengawal setiap tahapan pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh personil sekretariat PPK dan PPS yang telah berkontribusi penuh dalam mensukseskan jalannya Pilkada, yang berjalan dengan jujur, adil, dan transparan.

Ketua KPU Bombana, Hasdin Nampo, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan rasa syukurnya atas dedikasi personil sekretariat yang tidak kenal lelah sepanjang proses Pilkada berlangsung. "Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh personil sekretariat PPK dan PPS yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab. Mereka sangat berperan penting dalam menyukseskan setiap tahapan Pilkada, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan," ujar Hasdin.

Hasdin menjelaskan, tugas personil sekretariat PPK dan PPS jauh lebih dari sekadar administrasi. Mereka menjadi ujung tombak dalam kelancaran teknis dan operasional pemilu di tingkat kecamatan dan desa. Mulai dari mengelola dan mempersiapkan berbagai dokumen penting, pendataan pemilih, distribusi logistik pemilu, hingga pelaporan hasil pemungutan suara, semuanya berjalan dengan baik berkat kerja keras mereka. "Personil sekretariat PPK dan PPS tidak hanya bertugas di balik layar, namun mereka adalah pihak yang memastikan semua tahapan Pilkada dapat berlangsung sesuai prosedur yang ada," jelasnya.

Lebih lanjut, Hasdin menyampaikan bahwa petugas sekretariat turut berperan aktif dalam memastikan akurasi data pemilih dan distribusi logistik yang tepat waktu. "Kami paham bahwa pekerjaan mereka tidaklah mudah, mengingat

geografis Bombana yang cukup beragam. Namun, dengan kerjasama yang baik dan ketekunan, personil sekretariat PPK dan PPS dapat memastikan bahwa logistik sampai di setiap TPS dengan tepat waktu, dan data pemilih tetap terupdate dan valid,” tambahnya.



Ketua KPU Bombana, Hasdin Nompou

Hasdin juga menekankan pentingnya netralitas dan profesionalisme yang ditunjukkan oleh seluruh personil sekretariat selama proses Pilkada. “Kami bangga karena seluruh personil sekretariat PPK dan PPS menjalankan tugasnya dengan penuh integritas. Selama Pilkada berlangsung, tidak ada laporan pelanggaran, dan mereka tetap menjaga independensi dalam menjalankan tugas mereka,” katanya.

Dalam rangkaian Pilkada, tidak hanya tugas administratif yang dijalankan oleh sekretariat PPK dan PPS, namun mereka juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. “Upaya mereka dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait Pilkada sangat berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Ini tentu saja sangat berarti untuk menjaga demokrasi yang sehat,” tambah Hasdin.

Setelah seluruh tahapan Pilkada selesai dan tidak ada gugatan di Mahkamah

Konstitusi (MK), KPU Bombana kini bersiap untuk menyerahkan hasil pemilihan kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk proses pelantikan pasangan calon terpilih. “Setelah tugas kami selesai, langkah berikutnya adalah pengusulan pelantikan kepada pihak yang berwenang. Kami berharap pasangan calon terpilih dapat segera bekerja dan mewujudkan janji-janji mereka kepada masyarakat,” ujar Hasdin.

Sebagai bentuk penghargaan, KPU Bombana berencana memberikan apresiasi kepada seluruh personil sekretariat PPK dan PPS yang telah memberikan kontribusi terbaik selama Pilkada 2024. “Mereka adalah pahlawan yang bekerja di balik layar untuk memastikan Pilkada berjalan dengan sukses. Kami ingin memberikan penghargaan sebagai bentuk terima kasih atas dedikasi dan kerja keras mereka,” tutup Hasdin.

Pilkada Bombana 2024 menunjukkan betapa pentingnya kerja sama antara seluruh pihak penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menciptakan pemilihan yang sukses dan damai. Diharapkan, semangat kebersamaan ini terus terjaga untuk memperkuat proses demokrasi dan memberikan dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Bombana di masa depan. (advetorial)

Pilkada Bombana Sukses, KPU Sampaikan Terima Kasih Atas Dedikasi 539 Anggota PPK dan PPS

Bombana, sultranet.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bombana tahun 2024 telah berjalan sukses dan lancar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini, khususnya 539 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah bekerja dengan

penuh dedikasi dari awal hingga akhir proses pemilu.

Ketua KPU Bombana, Hasdin Nampo, dalam keterangannya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Senin (27/1/2025)

Menurut Hasdin, suksesnya Pilkada Bombana tidak terlepas dari kerja keras seluruh elemen penyelenggara, mulai dari KPU, Bawaslu, hingga PPK dan PPS yang menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap tahapan berjalan dengan baik.

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras 539 anggota PPK dan PPS yang telah mengabdikan diri dengan penuh dedikasi. Mereka telah menjalankan tugas mulai dari pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, hingga rekapitulasi hasil pemilu. Tanpa kerja keras mereka, Pilkada ini tidak akan berjalan dengan baik,” ujar Hasdin.

Pilkada Bombana 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon, yakni pasangan nomor urut 1, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, pasangan nomor urut 2, Hj. Andi Nirwana Sebbu, SP., MM, dan Heryanto, SKM, serta pasangan nomor urut 3, Hasrat Haji Nabi, SH, dan Ir. H. M. Rifai Gunawas, M.Si.



Ketua KPU Bombana, Hasdin Nompou

Proses pemungutan suara berjalan lancar di 273 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh kecamatan di Bombana. Peran PPK dan PPS dalam memastikan kelancaran pemungutan suara, menjaga netralitas, serta menjamin akurasi hasil pemilu sangat krusial dalam menciptakan Pilkada yang jujur dan transparan.

Sejak tahapan awal, PPK dan PPS telah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pemutakhiran data pemilih yang harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan hak suara setiap warga tetap terjaga, hingga pendistribusian logistik ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

“Kami menyadari bahwa tugas PPK dan PPS sangat berat, terutama di daerah-daerah yang aksesnya sulit. Namun, mereka tetap menjalankan tugas dengan penuh semangat dan profesionalisme. Ini adalah bentuk dedikasi mereka terhadap demokrasi,” lanjut Hasdin.

Dalam proses rekapitulasi suara, peran PPK dan PPS juga menjadi sangat penting. Mereka harus memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan benar dan transparan. Selain itu, mereka juga harus menjaga keamanan kotak suara

dari TPS ke tingkat kecamatan hingga kabupaten. Tantangan lainnya adalah menjaga independensi dan netralitas selama tahapan Pilkada berlangsung.

“Kami bangga karena seluruh anggota PPK dan PPS telah menjalankan tugasnya dengan penuh integritas. Mereka memastikan bahwa Pilkada ini berlangsung dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” kata Hasdin.

Hasdin juga menyoroti bagaimana koordinasi antara PPK, PPS, dan stakeholder lainnya, seperti aparat keamanan dari Polres Bombana dan Kodim 1431, serta pengawas pemilu dari Bawaslu, telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama proses Pilkada berlangsung.

“Tanpa sinergi yang baik antara semua pihak, Pilkada ini tidak akan berjalan seaman dan tertib ini. Semua elemen telah berperan dalam menciptakan pesta demokrasi yang damai,” ungkapnya.

KPU Bombana juga mengakui bahwa peran PPK dan PPS tidak hanya berhenti setelah proses rekapitulasi suara selesai. Mereka juga berperan dalam sosialisasi kepada masyarakat mengenai tahapan pemilu, pendidikan pemilih, serta membantu dalam penyelesaian berbagai kendala teknis yang muncul selama proses Pilkada.

“PPK dan PPS adalah ujung tombak penyelenggaraan pemilu. Mereka tidak hanya bertugas pada hari pemungutan suara, tetapi juga sejak jauh-jauh hari memastikan bahwa masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih,” jelas Hasdin.

Suksesnya Pilkada Bombana juga menjadi bukti nyata bahwa kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemilu semakin meningkat. Hasdin mengapresiasi partisipasi masyarakat Bombana yang datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya.

“Tingginya angka partisipasi pemilih menunjukkan bahwa masyarakat Bombana semakin memahami pentingnya Pilkada dalam menentukan pemimpin daerah yang akan membawa perubahan dan pembangunan,” ujarnya.

Dengan telah ditetapkannya hasil Pilkada dan pasangan calon terpilih, KPU Bombana berharap agar seluruh masyarakat dapat bersatu kembali dan mendukung pemerintahan yang baru. Hasdin mengajak semua pihak untuk

kembali merajut kebersamaan demi pembangunan Kabupaten Bombana yang lebih baik.

“Pemilu telah selesai, saatnya kita bersatu. Mari kita dukung pemerintahan yang baru dengan semangat kebersamaan, karena pembangunan daerah ini adalah tanggung jawab kita bersama,” serunya.

Sebagai bentuk apresiasi, KPU Bombana berencana memberikan penghargaan kepada anggota PPK dan PPS yang telah bekerja dengan baik selama proses Pilkada berlangsung.

“Mereka adalah pahlawan demokrasi yang bekerja di balik layar. Kami ingin memberikan penghargaan kepada mereka sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja kerasnya,” tutup Hasdin.

Pilkada Bombana 2024 telah berjalan dengan sukses, damai, dan demokratis. Semua pihak yang terlibat, khususnya PPK dan PPS, telah memberikan sumbangsih besar dalam memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai aturan dan prinsip demokrasi. Dengan keberhasilan ini, diharapkan pemilu-pemilu mendatang dapat terus berjalan dengan lebih baik, semakin transparan, dan semakin memperkuat demokrasi di Bombana. (adv)

Peduli Kebersihan Lingkungan, Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia Bersama Kades Pimpin Kerja Bakti

Bombana, SultraNET. | - Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia bersama Kepala Desa Lampata memimpin kegiatan kerja bakti di Desa Lampata, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini difokuskan pada pembersihan kanan kiri jalan dan drainase sebagai langkah antisipasi menghadapi musim

penghujan guna mencegah terjadinya banjir. Minggu, (26/01)

Kerja bakti ini dihadiri oleh Kepala Desa Lampata Filuddin, Kepala Dusun 3 Akke Daeng Langsa, serta Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia yang dipimpin oleh Sertu Amiruddin. Selain itu, sekitar 10 orang warga turut berpartisipasi dalam kegiatan ini sebagai wujud kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.



Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia, Sertu Amiruddin, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Kegiatan ini penting untuk mengurangi risiko banjir saat musim hujan tiba, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi warga,” ujarnya.

Sementara itu, Danramil 1431-01/Rumbia Kapten Inf Syafaruddin mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam kerja bakti ini.

“Gotong royong seperti ini harus terus dipertahankan sebagai budaya yang memperkuat kebersamaan dalam menjaga lingkungan,” ungkapnya.

Kepala Desa Lampata, Filuddin, juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Babinsa dan masyarakat yang telah berpartisipasi.

“Kami sangat mengapresiasi kerja sama ini. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut demi menciptakan desa yang bersih, sehat, dan nyaman,” pungkasnya.

Aneh. Sertifikat Hak Milik Warga Bakal Digugat Pemkab Muna, Hanya Berdasar SKT ?

MUNA, Sultranet.com - La Ode Awori, pemilik sah sebidang tanah di Desa Laiba, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, yang telah mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), dirumorkan akan digugat oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna.

Anehnya, Pemkab dikabarkan hanya mendasarkan klaim mereka pada Surat Keterangan Tanah (SKT), sebuah dokumen yang lebih lemah secara hukum dibandingkan sertifikat tanah.

Pendamping hukum La Ode Awori, Ramadhan SH, menilai langkah Pemkab Muna ini sebagai upaya yang tidak logis dan justru memperlihatkan lemahnya perlindungan pemerintah terhadap hak-hak warganya.

“Bagaimana mungkin sertifikat tanah yang diterbitkan BPN, lembaga negara, akan digugat dengan SKT yang status hukumnya tidak sekuat sertifikat? Bukannya melindungi rakyat, pemerintah justru mempersulit,” tegas Ramadhan, Jumat (24/1/2025).

Ia menambahkan, tanah tersebut sudah lama dimiliki oleh La Ode Awori, bahkan sebagian lahannya telah dihibahkan untuk bangunan sekolah dasar di wilayah tersebut.

Namun, belakangan Pemkab menyebut tanah itu adalah milik pemerintah karena terdapat bangunan sekolah dan rumah dinas guru di atasnya.

Kepentingan di Balik Pembangunan BTS

Ramadhan menduga polemik ini mencuat karena adanya rencana pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di lokasi tersebut.

Menurutnya, pemerintah terkesan mencari-cari alasan untuk menghambat proses pembangunan yang sebenarnya sudah mendapat persetujuan dari warga sekitar.

“Kenapa baru sekarang masalah ini muncul? Jangan sampai ada kepentingan tertentu yang menyebabkan pemerintah kasak-kusuk membahas tanah ini. Padahal, sertifikat tanah jelas lebih kuat dibandingkan SKT,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan sikap pemerintah yang sebelumnya berhasil mengupayakan pengalihan status tanah untuk kepentingan rakyat di wilayah lain, namun justru mempersulit warganya sendiri di Desa Laiba.

Sertifikat vs SKT, Mana yang Sah?

Ramadhan menegaskan bahwa proses penerbitan sertifikat tanah tidak mungkin dilakukan tanpa dasar SKT.

Oleh karena itu, ia meminta Pemkab Muna untuk menjelaskan secara transparan dasar hukum klaim mereka.

“Pemerintah seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan malah mempersulit warga yang ingin memanfaatkan tanahnya untuk kebutuhan yang bermanfaat, seperti pembangunan BTS,” tambahnya.

Sementara itu, La Ode Awori menyampaikan kekecewaannya terhadap tindakan Pemkab Muna. Ia merasa haknya sebagai pemilik lahan yang sah telah diabaikan.

“Saya hanya ingin menggunakan tanah saya sesuai peruntukan. Tapi, kenapa dipersulit seperti ini?” keluhnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemkab Muna belum memberikan tanggapan resmi terkait polemik ini.

Isra Mi'raj di Kodeoha, Momentum

Tingkatkan Ibadah dan Dukung Program Pemerintah

Lasusua, sultranet.com - Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW berlangsung khidmat di Masjid Baitur Rahim, Kelurahan Mala-Mala, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Sabtu, 25 Januari 2025

Acara ini digelar oleh Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kecamatan Kodeoha bersama Majelis Taklim Kelurahan Mala-Mala dan dihadiri ratusan warga setempat.

Hikmah Isra Mi'raj disampaikan oleh Ustaz Jamaluddin, S.Pd.I., M.Pd., Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kodeoha.

Dalam tausiyahnya, Ustaz Jamaluddin mengupas tata cara wudu, bersuci, shalat, dan doa-doa yang menjadi bagian penting dari perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW.



Ustaz Jamaluddin, S.Pd.I., M.Pd

Ia juga menyoroti kesetiaan Siti Khadijah dalam mendampingi Rasulullah menyebarkan Islam.

Acara ini dihadiri Plt. Camat Kodeoha Syahlan Launu, S.H., bersama Ketua TP-PKK Kecamatan Kodeoha, Ny. Yusriani Syahlan, pengurus BKMT Kecamatan Kodeoha, serta para tokoh agama, pemuda, dan masyarakat setempat.

Turut hadir Majelis Taklim Desa Kalu-Kaluku, staf KUA Kodeoha, dan warga Kelurahan Mala-Mala.



Dalam sambutannya, Plt. Camat Kodeoha menegaskan pentingnya peran BKMT dalam mendukung berbagai program pemerintah.

Ia menyampaikan bahwa BKMT di tingkat desa dilibatkan untuk mendukung program ketahanan pangan sebagai wujud implementasi Asta Cita Presiden Prabowo.

Selain itu, pemerintah kecamatan bersama BKMT akan mengadakan pengajian bulanan di seluruh 12 desa dan kelurahan di Kecamatan Kodeoha untuk mempererat silaturahmi dan membangun kolaborasi.

BKMT juga berperan aktif dalam mendukung program pemerintah untuk

menurunkan angka stunting dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya para ibu, mengenai pentingnya gizi dan pola hidup sehat.

“Semoga Kecamatan Kodeoha mampu mewujudkan baldatun tayyibatun warabbun ghafur dan menciptakan masyarakat madani di Kolaka Utara,” ungkap Syahlan.

Peringatan Isra Mi'raj ini tidak hanya menjadi momen refleksi spiritual, tetapi juga langkah konkret dalam membangun sinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk mendukung berbagai program strategis di Kecamatan Kodeoha.

Evaluasi Pilkada Bombana 2024: Kesbangpol Soroti Peran Pemda dalam Menjaga Netralitas ASN dan Stabilitas Politik

KENDARI, sultranet.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana menggelar kegiatan Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bombana 2024 di Hotel Fortune Front One Kendari pada Sabtu, 25 Januari 2025. Acara ini dihadiri oleh 110 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 429 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pilkada tahun lalu.

Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan Pilkada Bombana 2024, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mencari solusi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Evaluasi ini juga menjadi wadah bagi berbagai pihak untuk menyampaikan masukan terkait peran serta tanggung jawab masing-masing instansi dalam mendukung pesta demokrasi.

Salah satu narasumber dalam kegiatan ini adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana, Drs. Budiman, MM, yang mewakili Kepala Kesbangpol, dr. H. Sunandar, MM.Kes. Dalam paparannya, Budiman menyoroti peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dalam mendukung kelancaran Pilkada 2024, khususnya dalam aspek anggaran, keamanan, netralitas ASN, serta penyediaan data pemilih.

“Badan Kesbangpol adalah leading sektor dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar, mulai dari menjamin ketersediaan anggaran, menjaga stabilitas politik dan keamanan, hingga memastikan netralitas ASN. Selain itu, kami juga bertanggung jawab dalam penyediaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada KPU,” ujar Budiman.

Ia menambahkan bahwa selama Pilkada 2024, Kesbangpol berfokus pada penguatan koordinasi lintas instansi serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Menurutnya, evaluasi yang dilakukan ini sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pemilu di tahun-tahun mendatang.

“Evaluasi ini menjadi refleksi bagi kita semua, bagaimana penyelenggaraan Pilkada 2024 telah berjalan, apa kendala yang dihadapi, dan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pemilu ke depan,” tambah Budiman.

Selain Budiman, kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber lain, di antaranya Kapolres Bombana, perwakilan Kodim 1431 Bombana, Kejaksaan Negeri Bombana, serta Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sultra. Setiap narasumber menyampaikan hasil evaluasi dari perspektif masing-masing, termasuk aspek keamanan, penegakan hukum, serta peran pemantau pemilu dalam memastikan transparansi dan keadilan dalam proses pemilu.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Ketua KPU Kabupaten Bombana, Aminuddin, SE, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya evaluasi sebagai upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pilkada mendatang.

“Kami berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan bagi kita semua dalam menghadapi pemilu berikutnya, agar penyelenggaraannya semakin baik dan demokratis,” kata Aminuddin.

Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada Bombana 2024 dapat memberikan masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Bombana. Perbaikan yang dilakukan sejak dini akan berkontribusi pada terselenggaranya pemilu yang lebih transparan, adil, dan profesional di masa depan.

Senjata Api Personel Polres Bombana Diperiksa

Bombana, sultranet.com - Polres Bombana melakukan pemeriksaan senjata api (senpi) milik personel dan inventaris, Kegiatan yang berlangsung di Mako Polres Bombana tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., dan didampingi Wakapolres Kompol Reda Irfanda, S.H., S.I.K., M.H., Kabag SDM AKP Prasadja, S.H., serta Kasipropam IPDA Robert, S.H. Jumat (24/1/2025) pagi.

Pemeriksaan ini mencakup senjata api perorangan dan inventaris dari SPKT, Sat Samapta, Sat Resnarkoba, dan Sat Reskrim.

Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K menegaskan pentingnya disiplin dan tanggung jawab dalam kepemilikan serta penggunaan senjata api.

“Setiap personel yang memegang senjata api wajib memenuhi syarat psikologi dan administrasi yang telah ditentukan. Selain itu, keamanan dalam penyimpanan senjata, baik saat bertugas maupun di rumah, harus menjadi prioritas,” ujar AKBP Wisnu Hadi.

Kapolres juga mengingatkan pentingnya perawatan senjata agar selalu dalam kondisi siap pakai.

“Senjata harus dirawat dan dijaga kebersihannya. Penggunaan senjata pun harus sesuai prosedur, hanya digunakan dalam situasi tertentu dan untuk melumpuhkan, bukan untuk tujuan lain,” tambahnya.

Kapolres juga menyarankan agar latihan menembak rutin digelar untuk meningkatkan keterampilan personel.

“Latihan menembak perlu dilakukan secara berkala, terutama bagi pemegang senjata api, agar mereka selalu siap menghadapi situasi di lapangan,” tegas Kapolres.

Kasipropam IPDA Robert melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat senjata api, nomor seri, jumlah peluru, serta kebersihan senjata. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan senjata yang digunakan memenuhi standar keamanan dan layak pakai.

Kegiatan ini merupakan langkah preventif Polres Bombana untuk memastikan profesionalitas dan kesiapan personel dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pemkab Muna Dituduh Halangi Pembangunan BTS, Pemilik Lahan Tempuh Jalur Hukum

MUNA, Sultranet.com - La Ode Awori, pemilik lahan di Desa Laiba, Kecamatan Parigi, resmi melaporkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna ke Polres Muna pada Jumat (24/1/2025). Laporan ini terkait dugaan penghalangan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di atas lahan miliknya yang telah bersertifikat.

Ramaddan, perwakilan keluarga sekaligus juru bicara La Ode Awori, mengungkapkan bahwa laporan tersebut mencakup dugaan tindakan penghalangan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Muna, Asisten Daerah, serta Kepala Sekolah SDN 5 Parigi.

“Tanah ini adalah milik keluarga kami yang sah, dengan sertifikat hak milik bernomor 00435 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Namun, Pemkab Muna justru menggugat dan menganggap tanah ini bermasalah,” ujar Ramaddan.

Menurut Ramaddan, rencana pembangunan BTS tersebut sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari warga sekitar. Namun, Pemkab berdalih bahwa lokasi tersebut tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) karena berdekatan dengan aset daerah, yakni bangunan SDN 5 Parigi.

Ramaddan mempertanyakan alasan Pemkab dan menuding adanya standar ganda dalam penerapan aturan. “Jika menelisik BTS lain yang sudah ada di Muna, apakah semuanya sudah sesuai SOP? Bahkan ada yang dibangun tanpa persetujuan warga. Jadi, alasan ini hanya mencari-cari masalah,” tegasnya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa pembangunan BTS di Desa Laiba sangat penting untuk mendukung akses komunikasi masyarakat, mengingat lokasi ini akan menjadi penghubung jaringan bagi wilayah Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah.

Kapolres Muna melalui Kepala SPKT Polres Muna, Ipda Qodrat, membenarkan adanya laporan tersebut. “Iya, laporan atas nama La Ode Awori telah kami terima,” singkatnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemkab Muna belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut. Sementara itu, masyarakat Desa Laiba berharap agar proses pembangunan BTS dapat segera terealisasi tanpa kendala hukum lebih lanjut.